

42855

**PERANAN ADAT DAN KELEMBAGAAN ADAT MELAYU
DALAM MEREKAT PERSEBATHAN MASYARAKAT RIAU**

Oleh: Tenas Effendy

PERANAN ADAT DAN KELEMBAGAAN ADAT MELAYU DALAM MEREKAT PERSEBATHAN MASYARAKAT RIAU

Oleh: Tenas Effendy

I. PENDAHULUAN

Ketika seorang Melayu dikatakan "*tidak-tahu adat*" atau "*tidak-beradat*", pastilah orang itu akan "*naik darah*" dan "*pitamnya*", karena sebutan dimaksud adalah "*hinaan*" yang dipantangkan orang Melayu. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya adat dalam kehidupan orang Melayu, terutama Melayu masa silam.

Ungkapan adat Melayu menegaskan: "*biar mati anak jangan mati adat*", mencerminkan betapa pentingnya kedudukan adat dalam kehidupan orang Melayu. Orangtua-tua mengatakan: "*mati anak duka sekampung, mati adat duka senegeri*", mempertegas keutamaan adat yang menjadi anutan seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehilangan adat, matinya adat, menyebabkan kehilangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Padahal adat, adalah sandaran utama dalam kehidupan mereka. Dari sisi lain, ungkapan ini, menegaskan, bahwa di dalam penegakan "adat" (hukum) hendaklah mengenyampingkan kepentingan diri dan pribadi, dan memberlakukannya kepada semua orang secara adil dan merata. Maksudnya, dalam menegakkan adat dan hukumnya, dilaksanakan tanpa pilih kasih, bahkan terhadap diri dan "anak" sendiripun hukum adat harus ditegakkan, supaya tua,marwah, harkat dan martabat serta wibawa adat tidak mati.

Orangtua-tua Melayu mengatakan: “*apa tanda Melayu sejati, adat resamnya pakaian diri*”; atau dikatakan: “*apa tanda Melayu terbilang, adat dipakai pusaka disandang*”; atau dikatakan: “*apa tanda Melayu bertuah, memegang adat ia amanah*”. Ungkapan-ungkapan seperti ini dahulu amat lazim dituturkan oleh orangtua-tua kepada anak-anak mudanya, agar mereka memahami bahwa hidup dan kehidupan ini tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat yang mereka warisi turun temurun.

Mengapa adat menjadi penting dalam kehidupan orang Melayu khasnya dan manusia umumnya? Karena adat umumnya mengatur hampir semua sisi kehidupan, memberikan arahan dan landasan dalam semua kegiatan, mulai dari yang besar sampai kepada hal-hal yang paling kecil. Adat mengajarkan orang untuk menjadi manusia beradab, menjadi manusia yangt bersopan santun, tenggang menenggang, saling hormat menghormati, tahu diri, tolong menolong dan sebagainya agar dapat menciptakan iklim kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan, adat Melayu adalah adat yang bersumber dan mengacu kepada ajaran Islam. Karenanya, adat dijadikan “*pakaian diri*” atau “*jatidiri*” masyarakat pendukungnya. Orangtua-tua mengatakan: “*kalau hendak tahu kemuliaan umat, tengok kepada adat istiadatnya*”; atau dikatakan: “*bahasa menunjukkan bangsa, adat menunjukkan umat*”.

Untuk mengekalkan, dan menegakkan tuah dan marwah, harkat dan martabat, dan mengokohkan kedudukan dan fungsi adat, serta menyebarkanluaskannya ke tengah-tengah masyarakat, maka orang Melayu secara turun temurun membentuk kelembagaan-kelembagaan adat tempatan. Lembaga-

lembaga adat inilah yang secara terus menerus mewarisi dan menjalankan semua hukum adatnya. Lembaga ini pula yang dengan penuh kearifan menjadi “penegak” adat, yang selanjutnya memfungsikannya untuk kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakatnya. Dengan kedudukan yang terhormat itu, kelembagaan ini memiliki fungsi yang teramat luas. Salah satu fungsi utamanya ialah menjadi “payung” atau “penaung” masyarakat agar terwujud masyarakat yang bersatu, aman dan damai, sejahtera, dan beradab.

Di Riau, kelembagaan adat sudah ada sejak ratusan tahun yang silam. Kelembagaan ini terdapat dalam semua lapisan masyarakat, terdapat dalam semua sistem pemerintahan dan terdapat di dalam semua puak-puak Melayu. Kelembagaan adat inilah yang menjadi pengawal abadi nilai-nilai asas adat istiadat Melayu yang mereka warisi turun temurun.

Namun demikian, terjadinya perubahan zaman, terjadinya berbagai perubahan dan pergeseran nilai, terjadinya pergantian sistem pemerintahan, dan perubahan tatanan masyarakat, menyebabkan kelembagaan adat tradisi Melayu mengalami perubahan dan pergeseran pula. Kelembagaan-kelembagaan adat tradisi yang semula berpunca dan mengacu kepada sistem pemerintahan kerajaan, kedatuan dan sebagainya, setelah Indonesia merdeka, secara berangsur-angsur mulai beralih. Kendali teraju yang semula berpunca di pusat-pusat pemerintahan kerajaan tidak lagi terpelihara, dan akhirnya kehilangan pamor atau bahkan kehilangan batang tubuhnya. Akibatnya, banyak kelembagaan adat tempatan yang hilang atau terpuruk, atau kehilangan pengaruh dan wibawa, atau bahkan lenyap sama sekali. Dampak berikutnya, wawasan adat menjadi sempit, adat hanya dianggap sebatas “upacara perkawinan” semata. Anggapan ini lambat laun dapat

menyebabkan banyak unsur adat terabaikan dan bahkan sebagian lesap sama sekali. Padahal, justru nilai-nilai itulah yang mengekalkan “jatidiri” adat Melayu di Riau.

Menyadari kerugian yang teramat besar itu, maka sekitar tahun 1968 diadakanlah pertemuan terbatas antar pemuka masyarakat adat dan tokoh masyarakat Melayu Riau di Pekanbaru. Dari situlah tumbuh gagasan untuk mewujudkan kelembagaan adat Melayu yang mencakupi seluruh provinsi Riau. Setelah melalui berbagai perbincangan, pertimbangan dan sebagainya, akhirnya dalam tahun 1971 kelembagaan inipun diwujudkan, dinamakan: “*Lembaga Adat Daerah Riau*”. Selanjutnya dalam Mubes Lembaga Adat Daerah Riau tahun 1994 nama kelembagaan ini diganti menjadi: “*Lembaga Adat Melayu Riau*” sampailah sekarang.

Dalam perjalanan selama 31 tahun itu, lembaga adat ini sudah berupaya untuk mengangkat marwah adat Melayu Riau. Dengan segala keterbatasannya mengupayakan pula menerbitkan buku-buku dan mengkaji tentang adat resam Melayu Riau. Kemudian membentuk kelembagaan adat Melayu di daerah-daerah kabupaten dan kecamatan, atau memfungsikan kembali kelembagaan adat tradisi tempatan sampai ke peringkat desa (pebatinan dan kepenghuluan) dan kelembagaan kawasan dalam wilayah-wilayah kesatuan adat yang ada di Riau. Hasilnya memanglah belum banyak, namun, usaha ini nampaknya secara moral dapat memberikan motivasi kepada masyarakat Melayu untuk “kembali” menggali dan mengekalkan adat istiadatnya, dan kembali berupaya untuk memfungsikan kelembagaan adat tempatan. Lembaga Adat Melayu Riau juga berupaya memberikan sumbangan fikiran dalam menyelesaikan berbagai permasalahan,

terutama yang ada kait maitnya dengan hak-hak adat atau hutan tanah wilayah, yang sering terjadi di Riau. Selain itu, Lembaga Adat Melayu Riau juga membantu menyelesaikan permasalahan pertelikaian antar kelompok etnis (suku dan puak) masyarakat di Riau yang cenderung meningkat. Dalam upaya mengekalkan nilai-nilai adat dan budaya Melayu, Lembaga Adat Melayu Riau juga sudah menyusun “mata pelajaran budaya Melayu Riau” untuk diajarkan di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Pekanbaru, dan berbagai kegiatan lainnya sesuai dengan kemampuan yang ada.

II. ADAT MELAYU ADALAH ADAT YANG ISLAMI

Adat Melayu Riau adalah adat yang Islami, karena bersumber dan berasaskan kepada ajaran agama Islam. Ungkapan adat yang mengatakan: “*Adat bersendikan Syarak, Syarak bersendikan Kitabullah*”, menunjukkan bahwa adat Melayu bersebatu dengan Islam. Persebatian itu ditegaskan lagi dengan ungkapan adat yang menyebutkan: “*Syarak yang mengata, adat yang memakai*”, maksudnya, apa yang ditentukan oleh Syarak itulah yang dipakai oleh adat. Di dalam ungkapan lain dikatakan pula: “*Bila bertelikai adat dengan Syarak, tegakkan Syarak*”. Ungkapan ini memperjelas lagi sejauh mana pengaruh Syarak (Islam) terhadap adat istiadat, dan seandainya terdapat perbedaan antara adat dengan Syarak, maka yang dipakai adalah ketentuan Syarak.

Di dalam masyarakat Melayu Pesisir, ungkapan adatnya menyebutkan: “*Adat bersendikan Syarak*” (tidak disambung dengan perkataan “*Syarak bersendikan Kitabullah*”), sedangkan di kawasan Wilayah Kesatuan Adat Melayu Kepulauan Riau dikenal falsafah: “*Adat sebenar Adat ialah Qur'an dan Sunnah Nabi*”. Dengan demikian jelas, bahwa falsafah adat yang berlaku di semua kawasan adat Melayu Riau tetaplah mengacu kepada ajaran Islam, sehingga

persebatian adat Melayu dengan Islam semakin kental dan menyeluruh, sehingga mengekalkan adat dan budaya Melayu yang Islami yang sudah diwariskan turun temurun.

Persebatian antara adat Melayu dengan Islam, digambarkan bagaikan bersebatinya “*mata putih dengan mata hitam*”; yang dikatakan: “*rusak yang putih, binasa yang hitam; dan rusak yang hitam binasa pula yang putih*”. Persebatian ini pula yang menyebabkan seseorang yang bukan Islam masuk menjadi penganut Islam disebut “*masuk melayu*”. Persebatian inilah yang tidak dapat dipisahkan, sehingga orangtua-tua dengan tegas mengatakan: “*bahwa hakikatnya, adat Melayu itu adalah sepenuhnya bernafaskan dan berjiwakan Islam*”. Karenanya, bila seseorang dikatakan “*tidak tahu adat*” atau “*tidak beradat*”, dapat bermakna bahwa orang dimaksud “*tidak menghayati nilai-nilai keislaman*” atau “*tidak mencerminkan perilaku orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman*”.

Secara umum adat Melayu disebut “*adat istiadat*” atau “*adat resam Melayu*”, yang dibedakan dalam tiga kelompok adat, yakni:

1. “*Adat Sebenar Adat*”, yakni inti adat yang berasaskan ajaran agama Islam (Syarak). Adat inilah yang tidak boleh dianjak alih, tidak boleh diubah dan ditukar salin. Di dalam ungkapan adat dikatakan: “*dianjak layu, diumbut mati*”; atau dikatakan: “*bila dianjak ia membunuh, bila dialih ia membinasakan.*”
2. “*Adat Yang Diadatkan*”, yakni semua ketentuan adat istiadat yang diberlakukan atas dasar musyawarah dan mufakat, dan tidak menyimpang dari “*Adat Sebenar Adat*”. Adat ini dapat berubah sesuai dengan

perubahan zaman dan perkembangan masyarakat pendukungnya. Adat yang diadakan ini dahulu dibentuk melalui sidang-sidang kerapatan adat, terutama di pusat-pusat kerajaan, sehingga terbentuklah ketentuan-ketentuan adat yang diberlakukan bagi semua kelompok masyarakatnya.

3. “*Adat Yang Teradat*” yakni kebiasaan-kebiasaan yang diberlakukan di dalam masyarakat, yang tidak jelas asal usulnya, tetapi tidak bertentangan dengan “Adat Sebenar Adat dan “Adat Yang Diadakan”. Adat ini selalu berubah.

Dengan mengacu kepada ketiga jenis adat di atas, dapat disimpulkan, bahwa adat istiadat Melayu adalah adat istiadat yang mampu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, karena dilandasi oleh ajaran agama Islam yang universal dan berlaku sepanjang zaman. Sedangkan adat istiadat lainnya dapat terus berubah, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai asas “Adat Sebenar Adat” yakni ajaran Islam.

Lahirnya ketiga jenis adat ini tentulah berkait mait dengan latar belakang sejarah dan budaya Melayu itu sendiri. Budaya Melayu umumnya, khasnya Melayu Riau, adalah budaya yang terbuka. Keterbukaan itulah yang menyebabkan kebudayaan Melayu menjadi majemuk dengan masyarakatnya yang majemuk pula. Kemajemukan inilah sebagai salah satu khasanah budaya Melayu yang tangguh, serta sarat dengan keberagaman. Karenanya, orang mengatakan bahwa budaya Melayu bagaikan *pelangi* atau *taman bunga* yang penuh warna warni, indah dan memukau. Salah satu khasanah budaya Melayu yang paling sarat dengan nilai-nilai utama yang menjadi “*jatidiri*” kemelayuan itu adalah *adat*

istiadat atau dikatakan “*adat resam melayu*”. Di dalam adat inilah ditetapkan beragam ketentuan hukum adat yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakatnya, disempurnakan pula dengan berbagai penjelasan dan sanksi-sanksi hukum adatnya, serta dilengkapi dengan “pantang larang adat”.

Melalui proses keterbukaan itu pula adat resam Melayu menjadi kaya dengan variasi, sarat dengan simbol (lambang) dan falsafah dengan beragam nilai luhur. Kekayaan khasanah nilai itu dapat disimak antara lain dari keberagaman alat dan kelengkapan upacara adat, dari alat dan kelengkapan pakaian adat, dari bentuk dan ragam hias rumah, dari alat dan kelengkapan rumah tangga, dari upacara-upacara adat dan tradisi, dari ungkapan-ungkapan adat (pepatah petitih, bidal, ibarat, perumpamaan, pantun, gurindam, seloka, syair dll), yang mereka warisi turun temurun. Karenanya, tidaklah berlebihan bila ada yang berpendapat, bahwa khasanah budaya Melayu merupakan “*samudera budaya dunia*”, sebab di dalam budaya Melayu memang terdapat berbagai unsur budaya dunia. Dengan sifat keterbukaan itu pula budaya Melayu mampu menyerap beragam unsur budaya luar, sehingga memperkaya khasanah budaya Melayu itu sendiri.

Dari sisi lain, keterbukaan budaya Melayu tidaklah bermakna “*terdedah tanpa penapis*”, sebab adat *istiadat* Melayu menjadi salah satu penapis utama dari masuknya unsur-unsur negatif budaya luar. Nilai-nilai adat yang Islami itulah yang senantiasa menyaring dan memilah setiap unsur budaya luar yang masuk. Unsur yang baik mereka serap dengan kearifan yang tinggi, sedangkan yang buruk mereka buang dan jauhkan.

Sekarang kita melihat kenyataan, bahwa ada kecenderungan menurunnya wibawa adat, menurunnya pemahaman mengenai adat, menurunnya penghayatan

dan pengamalan nilai-nilai luhur adat, menurunnya peranan kelembagaan adat, dan sebagainya, sehingga terjadi pengikisan dan pengabaian nilai-nilai adat dan budaya tempatan, serta lesapnya sanksi-sanksi hukum adat. Akibatnya, terjadilah beragam perubahan dan pergeseran nilai bahkan sampai kepada terjadinya semacam "*krisis akhlak*", sehingga banyak sudah anggota masyarakat adat Melayu yang tidak lagi berperilaku sebagai "*orang beradat*", tetapi berubah menjadi "*orang yang emosional*", menjadi orang yang "*kasar langgar*", menjadi orang yang "*kehilangan sopan santun*", menjadi orang yang "*bangga dengan hujat menghujat*", menjadi orang yang "*berburuk sangka*", menjadi orang yang hidup "*nafsu nafsi*", menjadi orang yang "*mau menang sendiri*", menjadi orang yang mementingkan diri sendiri atau kelompoknya semata dan sebagainya.

K keadaan ini tentulah sangat patut dan layak untuk disimak dan diredam, agar tidak terus menerus merebak merusak tatanan kehidupan masyarakat Melayu yang beradat dan Islami. Pelanggaran terhadap hukum adat nyaris tidak dapat ditindak secara tegas, karena pemberlakuan hukum adat itu sendiri di beberapa tempat dan kelompok masyarakat sudah diabaikan sama sekali.

III. KEMANDIRIAN ADAT DAN KELEMBAGAAN ADAT

Adat dan kelembagaan adat haruslah memiliki *kemandirian* yang tinggi, agar tidak terjebak kepada kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Adat dan kelembagaan adat haruslah mampu *memayungi seluruh lapisan masyarakatnya*, *harus mampu menyatupadukan masyarakatnya*, *harus mampu menegakkan kebenaran*, *harus mampu mengatakan yang salah itu salah*, dan *yang benar itu*

benar. Adat dan kelembagaan adat haruslah mampu “menjernihkan yang keruh, menyelesaikan yang kusut, meluruskan yang bengkok, menarah yang berbongkol, mengampelas yang kesat”. Adat dan kelembagaan adat harus mampu merekat persebatian (persatuan dan kesatuan) antar sesama anggota masyarakat maupun antar bangsa dan negara. Orangtua-tua mengatakan: “bila sumbing jangan membawa belah, bila retak jangan membawa pecah” atau dikatakan: “salah besar diperkecil, salah kecil dihabisi”. Adat dan kelembagaan adat harus mampu menegakkan tuah dan marwah, harkat dan martabat masyarakat pendukungnya, serta mampu menjadi landasan dalam setiap rancangan dan pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, adat dan kelembagaan adat harus pula mampu memberikan petunjuk amanah, mampu memberikan tunjuk ajar kepada seluruh anggota masyarakatnya, serta berkemampuan untuk mencermati perkembangan zaman. Prinsip inilah yang akan dapat menempatkan adat dan kelembagaan adat pada kedudukan terhormat, yang dapat duduk sebagai salah satu unsur penting dari “*tali berpilin tiga*” atau “*tali berpintal tiga*” atau “*tali tiga sepilin*” atau disebut “*tungku tiga sejarangan*” (pemerintah, ulama dan adat), yang mampu “*menegur sapa*” aparat pemerintah maupun anggota masyarakatnya dengan cara *memurut alur dan patutnya*.

Di Riau, adat dan kelembagaan adat yang harus ditegakkan dan dikembangkan adalah adat Melayu Riau dengan segala perangkat kelebagaannya (*kelebagaan adat kerajaan, kelembagaan adat kedatuan, kelembagaan adat pebatinan, kelembagaan adat kepenghuluan, kelembagaan adat serantau, dll*), yang turun temurun diakui keberadaannya oleh masyarakat tempatan. Keberadaan

adat dan kelembagaan Melayu Riau, adalah bagian dari dari adat dan kelembagaan adat yang ada di Indonesia, sebagaimana tertera di dalam lambang negara "*Bhinneka Tunggal Ika*". Karenanya, upaya untuk menggali, membina dan mengembangkan budaya umumnya, adat istiadat Melayu khususnya haruslah dilakukan tanpa malu-malu dan was-was. Apalagi dengan dicanangkannya *visi dan misi 2020 Riau yang memimpikan* Riau ke depan akan menjadi pusat pengembangan ekonomi dan budaya Melayu, maka upaya "*mengangkat batang terendam*" ini haruslah segera dilakukan dengan sehabis daya.

Sejarah membuktikan, bahwa adat istiadat dan kelembagaan adat sejak dahulu memiliki *kemandirian* yang tinggi. Karenanya, Sultan selaku penguasa tertinggi beserta seluruh Orang Besar Kerajaan, Datuk-datuk, Penghulu-penghulu, Batin-batin, Pucuk-pucuk Adat, Hulubalang-hulubalang pun harus tunduk kepada adat. Wibawa adat dan kemandirian adat dan kelembagaan adat haruslah tetap dipelihara, agar benar-benar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Untuk itu, Kelembagaan Adat di setiap kawasan Wilayah Kesatuan Adat haruslah dihidupkan, dibina dan dikembangkan lagi, agar nilai-nilai hakikinya dapat dihayati, dicerna dan dijadikan "*jatidiri*" masyarakatnya. Kemudian dipayungi dan dibina secara terus menerus oleh Lembaga Adat Melayu Riau sesuai menurut peringkat dan kawasannya.

Namun perlu diartifi, bahwa akibat proses pengikisan nilai dan terabainya adat dan kelembagaan adat selama ini, menyebabkan upaya untuk mengekalkan, mengokohkan dan memandirikan adat dan kelembagaan adat menjadi berat. Apalagi ada oknum-oknum Pemangku Adat yang secara sadar atau tidak memanfaatkan adat untuk kepentingan diri atau kelompoknya, sehingga

menjatuhkan marwah adat baik dimata anak kewanitaan maupun di mata orang lain. Secara jujur harus pula diakui, bahwa kelembagaan adat yang ada di Riau, sampai sekarang belumlah sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan sering pula terjebak kepada kepentingan lain di luar jalur adat. Akibatnya, berkembang sindiran yang mengatakan, bahwa kelembagaan adat sudah beralih menjadi "*lembaga alat*", yakni alat untuk kepentingan tertentu, baik pribadi maupun kelompok dan sebagainya, atau sekedar menjadi alat *seremonial*, yakni sekedar alat mengelu-elukan tamu sebagai pajangan.

IV. FUNGSI ADAT

Dengan kedudukan adat dan kelembagaan adat yang tinggi, maka fungsi adat dan kelembagaan Adat itu pun menjadi penting pula. Fungsi dimaksud antara lain ialah untuk:

01. Menjabarkan nilai-nilai asas yang Islami.

Tidak dapat dimungkiri, bahwa adat resam Melayu hakikatnya adalah sebagai penjabaran dari nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh masyarakatnya. Melalui adat dan kelembagaan adat inilah beragam nilai yang Islami itu dikembangkan, kemudian disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakatnya. Nilai-nilai inilah yang kemudian dijadikan "*jatidiri*" kemelayuan yang Islami. Dan dari sini pula munculnya pendapat, bahwa kemelayuan seseorang tidak hanya ditentukan oleh suku atau etnis, melainkan ditentukan oleh nilai yang dianutnya: "*beragama Islam, beradat istiadat (budaya) Melayu dan berbahasa Melayu*". Dengan demikian kemelayuan seseorang menjadi luas, yang terwujud dari berbagai latar belakang suku dan puak.

02. Menjadi Jatidiri yang Islami

Adat Melayu yang Islami menjadi “jatidir” kemelayuan yang Islami, sehingga tidak dapat dipisahkan dari semua aspek kehidupan mereka. Itulah sebabnya dahulu, seseorang yang bukan Islam kemudian menganut agama Islam disebut “*masuk Melayu*”. Sebaliknya, bila seorang Melayu keluar dari agama Islam, disebut “*keluar dari Melayu, dan gugurlah segala hak-hak adat kemelayuannya*”.

c. Menjadi perekat persebatian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fungsi utama lainnya dari kelembagaan adat ialah sebagai “*perekat persebatian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*”. Fungsi ini amatlah penting, karena masyarakat di Riau adalah masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbilang kaum, puak dan suku. Kemajemukan ini memerlukan “*simpa*” dan “*perekat*” yang dapat menyatukan masyarakat yang beragam itu kedalam tatanan kehidupan yang aman dan damai, saling hormat menghormati, saling bantu membantu dsb.nya, sebagaimana disebutkan dalam ungkapan adat: “*senasib sepenanggungan, seaib dan semahu*”.

Ungkapan adat Melayu mengatakan: “*Hidup sebanjar ajar mengajar; hidup sedusun tuntun menuntun; hidup sekampung tolong menolong; hidup senegeri beri memberi; hidup sebangsa rasa merasa*”, yang intinya mencerminkan nilai persebatian (persatuan dan kesatuan), nilai kegotongroyongan, nilai tenggangrasa, dan nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya dikatakan: “*adat orang hidup serumah, sama menjaga tuah dan*

marwah; adat orang hidup berbangsa, sama menjaga budi bahasa”, yakni cerminan nilai tahu diri untuk saling hormat menghormati, saling menjaga nama baik, saling menjunjung nilai kesantunan dalam pergaulan sehari-hari baik dalam lingkungan masyarakat kecil maupun dalam kehidupan masyarakat yang luas dan berbilang bangsa. Orangtua-tua mengamanahkan pula: “*adat hidup berbilang suku, jauhkan sifat seteru berseteru; adat hidup berbilang bangsa, jauhkan sifat berburuk sangka*”, yang intinya mencerminkan perilaku terpuji dan menjauhkan segala sifat yang dapat menimbulkan perseteruan, permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Selanjutnya Orangtua-tua mengingatkan lagi : “*adat hidup di negeri orang, arif menyimak pantang dan larang; adat hidup di negeri sendiri arif menjaga marwah sendiri*”, yang intinya mengingatkan untuk memiliki kearifan dan tahu diri, baik hidup di negeri orang maupun di kampung halaman sendiri.

Asas-asas tunjuk ajar di atas tentulah patut dicermati, karena dahulu dijadikan landasan dan acuan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujudlah kehidupan yang tertib, aman dan damai, walaupun masyarakatnya terdiri dari berbilang puak dan suku, terdiri dari beragam umat dan agama. Kearifan para pendahulu kita sudah membuktikan, bahwa mereka dengan berlandaskan kepada nilai-nilai asas adat dan budayanya selama ratusan tahun mampu mengekalkan kehidupan yang tertib, aman dan damai, mampu mewujudkan kebersamaan dalam keberagaman masyarakatnya. Dari situlah lahir masyarakat yang majemuk dengan kebayaannya yang juga majemuk, yang lambat laun membentuk *jatidirinya* sebagai puak Melayu Riau, yang mampu menghadapi tantangan zaman, mampu menghadapi cabaran dari manapun juga, serta mampu menempatkan dirinya secara layak dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dari kemajemukan itulah dikekalkan beragam unsur nilai budaya, yang mengental

dalam petuah amanah, yang dibakukan dan dipateri sebagai tunjuk ajar dan petuah Melayu. Dari kemajemukan itulah Melayu berkembang dan mampu menempatkan dirinya sebagai salah satu puak yang sejak ratusan tahun silam dapat hidup duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan puak-puak maupun suku-suku lainnya di Nusantara ini.

Sekarang, kita hidup dalam kemajemukan yang lebih luas, hidup dalam alam yang lebih bervariasi, dengan berbilang puak dan sukubangsa, dengan beragam nilai budaya dan agama, baik sama sebangsa maupun dengan bangsa bangsa asing. Kondisi ini tentulah membuka peluang terjadinya "*intervensi*" budaya luar sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Hal ini dapat saja membawa perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya, dan dapat pula menimbulkan dampak negatif maupun positif. Namun diharapkan, apapun perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya dimaksud, apapun dampak dari kemajuan ilmu dan teknologi tidaklah mengikis nilai-nilai hakiki kebudayaan Melayu yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebersamaan, tenggangrasa, sangka baik, hormat menghormati, tahu diri, santun dan sebagainya itu. Bahkan diharapkan agar nilai-nilai luhur ini terus dikembangkan sebagai simpai dan perekat persebatian (kesatuan dan persatuan) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin majemuk dan terbuka.

V. NILAI-NILAI ASAS ADAT (BUDAYA) MELAYU RIAU YANG MENJADI PEREKAT PERSEBATIAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

Untuk mewujudkan fungsi kelembagaan adat sebagaimana disebutkan di atas, tentulah harus mengacu kepada nilai-nilai asas adat dan budaya Melayu, yang sudah teruji ketangguhan dan keluhurannya. Nilai-nilai asas inilah yang sejak

ratusan tahun yang silam mampu menciptakan kehidupan yang sejahtera lahiriah dan batiniah dengan keberagaman suku dan puak, kaum dan bangsa di bumi Melayu. Nilai-nilai asas inilah yang perlu dikembangkan, disebarluaskan dalam kehidupan berumahtangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diantara nilai-nilai asas dimaksud adalah:

01. Nilai keterbukaan

Budaya Melayu yang disebut sebagai budaya “bahari” adalah kebudayaan yang terbuka. Dengan keterbukaan itulah masyarakatnya menjadi majemuk dan kebudayaannya majemuk pula. Perbauran lintas suku bangsa, perpaduan berbilang kaum dan etnis, pergaulan antar umat dalam lintas negara, selama ratusan tahun, telah melahirkan masyarakat Melayu yang heterogen. Kemelayuan tidak lagi semata-mata mengacu kepada etnis, puak dan suku melainkan terbentuk dari keberagaman keturunan yang disimpai oleh kesamaan nilai, yakni: *Islam, adat dan budaya serta bahasa*. Perwujudan inilah yang dikenal sebagai “budaya pelangi” atau “budaya taman bunga” yang indah gemerlap dengan beragam warna, dan harum semerbak dengan beragam aroma. Kenyataan memang menunjukkan, bahwa di dalam budaya Melayu (Riau) terdapat kesamaan yang mendasar dengan berbagai unsur budaya etnis dan puak lainnya. Kesamaan inilah yang intinya dapat menjadi *benang merah, tali penyambung* dalam mengekalkan hubungan antar suku dan puak, dan menjadi titian untuk bersanding bahu menuju masyarakat yang tertib, aman dan damai.

Melalui keterbukaan itu pula orang-orang Melayu dahulu selalu menerima siapa saja yang datang ke daerahnya, menyambut tetamunya dengan *muka jernih* dan *dada lapang*, mempersilakan mereka untuk hidup dan berusaha, memberikan

mereka peluang untuk menetap dan berketurunan. Jalinan hubungan inilah yang mengekalkan perbauran, bahkan sampai meningkat kepada jalinan kekerabatan dan kekeluargaan baik melalui tali perkawinan antar suku maupun melalui pengangkatan saudara yang disebut “*begito*” (upaca adat mengangkat saudara dengan persumpahan sehidup semati dari duania sampai akhirat) dan sebagainya.

Sejarah Riau mencatat, dari keterbukaan itu pula wujudnya pemimpin-pemimpin Melayu yang berasal dari luar. Misalnya Sultan-sultan di kerajaan Siak Sri Indrapura dan Pelalawan sejak generasi Syarif Ali adalah keturunan Arab. Yang Dipertuan Muda Riau di kerajaan Johor Riau sejak tahun 1723 M adalah keturunan Bugis. Yang Dipertuan Besar Petapahan adalah keturunan Jambi. Bahkan di banyak daerah memiliki pemimpin yang berdarah Minangkabau, Jawa, Banjar, Aceh, Mandailing, dan sebagainya, sehingga kemajemukan itu membentuk suatu puak yang sangat heterogen, yang disebut Melayu Riau.

Perilaku keterbukaan itu pula menyebabkan Raja-raja di Tambusai, Dalu-Dalu, Rambah, Kepenuhan dan lainnya menerima masyarakat Tapunuli bermukim di wilayah kerajaannya sejak berabad yang silam. Mereka menetap dan turun temurun kekal di sana. Hal yang sama terjadi pula di kawasan lainnya, sehingga berbiaknya masyarakat Melayu Riau banyak ditentukan oleh perbauran antar etnis, suku dan puak itu.

Terjadinya persebatian antara masyarakat pendatang dengan penduduk tempatan tentu saja tidak terlepas dari perilaku semua pihak. Yang datang *tahu diri* demikian pula yang tempatan. Asas hidup “*dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung, dimana air disauk disana ranting dipatah*”, dahulu memang

ditaati oleh semua orang. Asas ini sebagai perwujudan *tahu diri* menyebabkan jarak antara pendatang dengan penduduk tempatan semakin mengecil, dan akhirnya melebur dalam satu kesatuan yang utuh dan kental. Perilaku *tahudiri* ini pula yang menyebabkan kerukunan hidup antar umat beragama, karena masing-masing agama senantiasa memelihara ajaran agamanya secara baik dan benar, yang berusaha menjauhkan segala silang sengketa. Para penganut agama apapun di Riau, tetap menempatkan dirinya dalam perilaku persaudaraan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agamanya masing-masing untuk menciptakan kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain itu, keterbukaan budaya Melayu selalu dikawal dengan asas kearifan semua pihak. Petuah orangtua-tua yang mengatakan : "*pantang mengorang-orang di kampung orang; pantang menghulu-hulu di kampung penghulu; pantang meraja-raja di kampung raja*" merupakan maklumat yang ditaati. Demikian pula dengan asas: "*mengambil hak awak berunding sesama awak; mengambil hak orang berunding dengan orang*", mewujudkan rasa kearifan untuk saling menjaga hak masing-masing, saling menjaga harkat dan martabat suku dan kaumnya. Nilai ini bukan saja menumbuhkan perilaku yang terpuji, tetapi juga mampu merekat tali persaudaraan dengan landasan kebersamaan.

Selanjutnya, terhadap masyarakat tempatan, adat mengingatkan untuk menjaga pelihara diri dan kampung halamannya secara seksama, agar dapat menunjukkan kepada pihak lain tentang hak dan tanggungjawabnya. Ungkapan adat mengatakan: "*rumah dijaga dengan amanah, kampung dijaga dengan marwah, dusun dijaga dengan kaidah, negeri dijaga dengan petuah*". Petuah ini

dianggap penting agar orang tidak berbuat semena-mena dan tidak menganggap kawasan itu sebagai kawasan “tidak bertuan”. Ungkapan adat mengatakan: *“bila halaman tidak berpagar, bila rumah tidak berdinging, angin lalu tempias lalu, aib terdedah malu tersimbah”*.

02. Nilai Keislaman

Budaya Melayu adalah budaya yang menyatu dengan ajaran agama Islam. Nilai keislaman sangatlah dominan, dan menjadi acuan dasar budaya Melayu. Karenanya, budaya Melayu tidak dapat dipisahkan dari Islam, sebagaimana tercermin dari ungkapan adat: *“Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah”*; *“syarak mengata, adat memakai”*; *“syah kata syarak, benar kata adat”*; *“bila bertelikai adat dengan syarak, tegakkan syarak”*, dan sebagainya.

Namun demikian, tidaklah bermakna bahwa budaya Melayu menolak masyarakat yang tidak satu akidah, bahkan sebaliknya menganjurkan untuk hidup saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling bertenggang rasa, tolong menolong dan seterusnya. Nilai inilah yang sejak dahulu mampu mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama di bumi Melayu.

Ungkapan adat mengatakan: *“adat hidup berbilang bangsa, pantang sekali hina menghina, pantang pula cerca mencerca”* selanjutnya dikatakan: *“adat hidup berlain akidah, sama bijak menjaga lidah, sama arif memelihara langkah, sama bijak mengatur tingkah”*, yang intinya mengingatkan agar perbedaan agama janganlah dijadikan ajang perpecahan, jangan dijadikan jurang pemisah tali persaudaraan, tetapi haruslah disikapi dengan arif dan bijak, serta dengan perilaku yang saling hormat menghormati.

03. Nilai “*Senenek dan semoyang*”

Nilai ini mengajarkan orang untuk merasa seasal dan seketurunan, yakni sama-sama anak cucu Adam dan Hawa. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, menyadarkan orang akan kesamaan nenek moyangnya yakni berasal dari Rumpun Melayu yang satu. Nilai ini mampu menumbuhkan rasa kekeluargaan dalam arti luas, sebagai simpai pengikat persebatian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai menyebabkan setiap diri dan kelompok suku maupun puak untuk berfikiran jernih menjaga tali “keturunan” yang “satu” atau “seasal” itu, sehingga mereka terhindar dari perpecahan atau pertelikaian dan sebagainya.

Ungkapan pantun adat mengatakan: “*ketuku batang ketakal, kedua batang keladi myang, sesuku kita seasal, senenek kita semoyang*”. Selanjutnya dijelaskan: “*tanda merasa senenek moyang, duduk bersama berkasih sayang, tegak beramai tenggang menenggang*”. Orangtua-tua memberi petuah: “*tanda Melayu sama serumpun, dalam bercakap bersopan santun, dalam susah tuntun menuntun, dalam senang santun menyantun*”. Petuah lain mengatakan: “*tanda orang sama seasal, sakit senang kenal mengenal; jauh dekat ingat mengingat, elok buruk jenguk menjenguk; sempit lapang jelang menjelang; tua muda jaga menjaga*”. Petuah ini semakin mengekalkan tali persaudaraan sebagai manusia beradat dan berbudaya, walaupun kenyataannya berlainan agama dan kepercayaan.

04. Nilai “*Seaib dan semalu*”

Nilai saling memelihara hubungan antar individu maupun antar kelompok masyarakat. Nilai ini mengajarkan dan menyadarkan orang agar hidup saling

tidak ada perilaku yang hujat menghujat, maki memaki, caci mencaci, fitnah memfitnah dan sebagainya yang dapat menimbulkan aib malu bagi orang maupun dirinya sendiri.

Ungkapan adat mengatakan: *“tanda hidup seaib semalu, yang buruk sama dibuang, yang keruh sama dijernihkan, yang kusut sama diselesaikan; salah besar diperkecil, salah kecil dihabisi”*. Selanjutnya dikatakan: *“aib jangan dibendangkan, malu jangan diperagakan”*. Ungkapan lain menyebutkan: *“aib jangan didedahkan, malu jangan disingkapkan”* atau dikatakan: *“aib orang jangan dibilang, aib diri yang kita kaji”*.

Petuah ini mengingatkan semua pihak untuk tetap menjaga tuah dan marwah, harkat dan martabat saudaranya, walaupun berlainan adat dan budaya atau berbeda agama dan kepercayaan. Kesadaran untuk saling menjaga pelihara inilah yang mengekalkan kerukunan hidup serta mengekalkan kedaiaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

05. Nilai “*Senasib sepenanggungan*”

Nilai menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama untuk saling tolong menolong, bantu membantu, ingat mengingatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi lain, nilai ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan menjauhkan perilaku yang hanya mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan. Dengan demikian, nilai ini dapat meredam tumbuhnya kesenjangan sosial, dan dapat pula mengikis sifat dengki dan iri mengiri, sifat mau menang sendiri, sehingga dapat mewujudkan tali persaudaraan yang kental.

Ungkapan adat mengatakan: *“tanda senasib sepenanggungan, bila ke laut sama basah, bila ke darat sama berkering; bila berezki sama berbagi, bila malang sama berhutang”* atau dikatakan: *“adat senasib sepenanggungan, dalam sempit sama berhimpit, dalam lapang sama melenggang”*. Orangtua-tua mengingatkan pula: *“bertuah bangsa seiya sekata, bertuah negeri bersatu hati”*.

06. Nilai *“Seanak sekemanakan”*

Nilai ini mengajarkan orang untuk merasa bertanggungjawab terhadap setiap anggota masyarakat tanpa memandang asal suku, keturunan dan sebagainya. Asas *“seanak sekemanakan”* menganjurkan orang untuk peduli terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya, agar saling nasehat menasehati, tegur menegur untuk kebaikan dan kebajikan bersama. Nilai ini dapat menumbuhkan rasa keadilan, serta dapat memberikan perlindungan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakatnya.

Di dalam ungkapan adat dikatakan: *“adat seanak sekemanakan, yang anak sama dipinak, yang kemanakan sama dibela, yang jauh diperdekat, menyalah diberi ingat, yang terlanjur sama ditegur, yang bengkok sama diluruskan”*.Orangtua-tua memberi petuah: *“tanda seanak sekemanakan, seayun lanfgkah seiring jalan”*.

07. Nilai *“Seinduk dan sebahasa, senenek dan semamak”*

Nilai ini mengajarkan agar setiap orang saling menghormati para pemimpin, tokoh dan tetua-tetua dari setiap kelompok masyarakat. Kebersamaan pandangan ini dapat mewujudkan kebersamaan dalam menyelesaikan permasalahan, dapat melakukan musyawarah mencari mufakat, dan dapat menghilangkan rasa

kesukuan yang sempit. Nilai ini juga dapat memberi peluang terbentuknya rasa tanggungjawab semua pimpinan suku dan puak untuk bersama-sama “menunjuk ajari” anak kemenakan dan kaum puaknya.

Ungkapan adat mengatakan: *“tanda seinduk dan sebahasa menyanggah tidak mencerca, bercakap tidak menista”* atau dikatakan: *“tanda orang senenek semamak, petuah diingat amanah disimak, seiya sekata duduk dan tegak”*.

08. Nilai *“Seadat sepusaka, sepucuk setali darah”*

Nilai mengajarkan untuk saling mengkaji asas-asas nilai adat dan budaya yang memiliki kesamaan, kemudian menjadikannya sebagai simpai pengikat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui kesamaan nilai-nilai luhur adat dan budaya itulah ditumbuhkan rasa persaudaraan yang kekal, yang dapat mewujudkan terjalannya hubungan tali darah, atau tali persaudaraan yang kental. Walaupun ada perbedaan antara budaya atau adat diantara puak dan suku, serta adanya perbedaan agama, namun diharapkan agar masing-masing puak dan suku atau kelompok memahami, bahwa di dalam perbedaan itu terdapat nilai-nilai universal yang dapat menjadi “benang merah” untuk menyimpai kerukunan hidup antar masyarakat, puak dan suku.

Ungkapan adat mengatakan: *“Walaupun lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, namun yang belalang tetaplah belalang, yang ikan tetaplah ikan, dalam berbeda banyak samanya”*. Selanjutnya dikatakan: *“Yang belalang sama ketingnya, yang ikan sama insangnya”*. Orangtua-tua mengingatkan: *“Walaupun corak kain beragam, yang benangnya sama juga”* atau dikatakan: *“berguna kain bukan karena raginya, tetapi karena benangnya”*

09. Nilai “*Sesampan dan sehaluan*”

Nilai ini menyadarkan orang tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, agar mereka mereka turut menyelamatkan, memelihara, bangsa dan negaranya, kemudian menyatukan visi dan misinya dalam membangun hari depannya. Nilai ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi, menyuburkan rasa kesetiakawanan sosial, mengekalkan rasa patriotisme serta menjauhkan orang dari perilaku yang dapat memecah belah bangsa dan negaranya.

Ungkapan adat mengatakan: “*Adat sesampan satu haluan, adat berlayar satu kemudi, adat memerintah satu titah, adat memimpin satu petunjuk*”. Selanjutnya dikatakan: “*elok berkayuh sama merengkuh, elok berdayung sama sealun, elok berjalan sama pedoman, elok berlayar sama tujuan*”.

10. Nilai “*Mendapat sama berlaba, hilang sama merugi*”

Nilai ini mengajarkan orang agar menjunjung tinggi keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, atau dalam memanfaatkan SDA dan sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan ekonomi dan sebagainya, hendaklah mengacu kepada asas keadilan dan pemerataan. Nilai ini mengingatkan orang untuk tidak bersifat serakah, untuk tidak mencari keuntungan bagi diri atau kelompok sendiri, melainkan mengutamakan kebersamaan dan pemerataan yang adil. Dari sisi lain, nilai ini menyiratkan agar menjauhkan monopoli, menjauhkan kebijakan dan usaha yang dapat merusak ekonomi bangsa dan negara. Nilai ini juga memberi petunjuk, agar apapun peluang yang ada, apapun kebijakan yang dibuat, hendaklah memberi sebesar-besar manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan apapun permasalahan yang timbul, haruslah menjadi tanggungjawab bersama untuk mengatasi dan menyelesaikannya.

Ungkapan adat mengatakan: “*makan jangan menghabiskan, minum jangan mengeringkan*”. Orangtua-tua mengingatkan: “*makan jangan kenyang seorang*” atau dikatakan: “*mencari laba berhingga-hingga, mencari untung berhitung-hitung*”; atau dikatakan: “*harta jangan membawa buta, pangkat jangan membawa sesat, kerja jangan membawa bencana*”. Selanjutnya diingatkan lagi: “*adat makan jangan menyetan, adat berusaha jangan aniaya, adat berniaga janganlah loba*”.

11. Nilai “*Menegakkan marwah dalam musyawarah, menegakkan daulat dalam mufakat*”

Nilai mengajarkan orang agar mengutamakan musyawarah dan mufakat, baik dalam merancang sesuatu maupun menyelesaikan permasalahan yang timbul. Nilai ini mengingatkan pula, bahwa marwah dan tuah, harkat dan martabat, daulat dan harga diri akan terpancar di dalam mewujudkan musyawarah dan mufakat. Asas musyawarah dan mufakat sebagai asas utama dalam adat, hendaklah dijadikan acuan dan landasan dalam kehidupan sehari, agar rasa kebersamaan, saling hormat menghormati, saling isi mengisi, saling menunjuk ajari dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

Ungkapan adat mengatakan: “*Di dalam musyawarah banyak faedah; di dalam mufakat banyak manfaat*”; atau dikatakan: “*Duduk musyawarah membawa berkah, duduk mufakat membawa rahmat*”. Ungkapan lain mengatakan: “*Di dalam musyawarah dan mufakat itulah yang kusut diselesaikan, yang keruh dijernihkan, yang berbongkol sama ditarah, yang kesat sama diampelas, yang bengkok diluruskan, yang menyalah dibetulkan*”. Orangtua-tua mengingatkan: “*Sempurna kerja karena bersama, sempurna helat karena mufakat*” atau dikatakan: “*Berdiri marwah karena musyawarah, tegak adat karena mufakat*”.

12. Nilai “Bercakap bersetinah, berunding bersetabik”

Nilai ini mengajarkan orang untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan, berperilaku sopan, tertib dan berbudi pekerti mulia. Nilai ini juga mengajarkan agar memelihara lidah, menjaga tingkah laku, menjauhkan sifat kasar langgar, memantangkan mencaci maki orang, berlagak kuasa dan sombong, merendahkan orang lain, mau menang sendiri, besar kepala, sombong dan angkuh dan sebagainya. Nilai ini tentulah sangat bermanfaat dalam membentuk kehidupan yang tertib, aman dan damai, amat berfaedah dalam mewujudkan masyarakat yang saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling tahu diri dan saling memelihara diri.

Ungkapan adat mengatakan: “*tanda orang beradat, elok perangai sempurna sifat*”; atau dikatakan: “*tanda orang terpuji, lembut lidah berlapang hati*”; atau dikatakan: “*tanda orang terpandang, bercakap tidak menyilang, berbicara tidak mencerca, berbual tidak menjual*”. Ungkapan lain menyebutkan: “*tanda orang beriman, perangnya elok berbicara sopan*”; atau dikatakan: “*tanda orang berilmu, cakupannya tidak menyingkap malu*” atau dikatakan: “*tanda orang terpuji, bercakap tidak mengeji, berbicara tidak memfitnah, menyanggah tidak menyumpah*”.

Orangtua-tua memberi peringatan: “*bila bercakap tidak semenggah, alamat kampung berpecah belah*” atau dikatakan: “*bila perangai tidak senonoh, lambat laun tentu bergaduh*”; atau dikatakan: “*bila bersikap kasar langgar, lambat laun tentu bertengkar*” atau dikatakan: “*bila pekerti tidak terpuji, orang muak saudarapun benci*”. Selanjutnya Orangtua-tua memberi petuah: “*adat hidup berbilang bangsa, luruskan hati haluskan bahasa*”; atau dikatakan: “*adat hidup*

berbilang puak, lembutkan lidah sempurnakan akhlak"; atau dikatakan: "*adat hidup berbilang suku, jangan sekali terburu nafsu*".

Di dalam tunjuk ajar Melayu dikatakan pula: "*apabila hendak rukun dan damai, elokkan laku baikkkan perangai*"; atau dikatakan: "*apabila perilaku bersopan santun, negeri aman hiduppun rukun*"; atau dikatakan: "*apabila hidup tahukan diri, marwah tegak tuah berdiri*". Selanjutnya disebutkan: "*apabila negeri hendak sentosa, elokkan dulu budi bahasa*" *dst.*

VI. SARAN UNTUK MENINGKATKAN PERANAN ADAT DAN KELEMBAGAAN ADAT.

Dengan menyadari betapa pentingnya adat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka upaya mengangkat marwah, harkat dan martabat serta memandirikan dan memfungsikan adat haruslah segera dilakukan. Upaya dimaksud disarankan:

1. Melakukan pendataan dan penggalian adat dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.
2. Melakukan kajian dan penulisan tentang adat istiadat, dan nilai-nilai luhurbudaya Melayu, serta menyebarnya ketengah-tengah masyarakat, termasuk menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah.
3. Menata dengan cermat kelembagaan adat tempatan, sehingga benar-benar menjadi kelembagaan adat yang beradat dan mandiri.

4. Melakukan sosialisasi adat kepada masyarakat dan menggalakkan upaya mewariskan adat kepada generasi muda tempatan, serta memberikan pemahaman tentang adat (budaya) Melayu kepada masyarakat pendatang.
5. Merancang “Program Kerja Kelembagaan Adat” tempatan agar dapat meningkatkan perannya dalam pembangunan daerah, memayungi masyarakatnya, membela hak-hak adat tempatan, memberikan petunjuk amanah kepada semua pihak termasuk aparat pemerintah dsb.nya.
6. Memfungsikan kelembagaan adat secara maksimal, terutama dalam upaya merekat persebatian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Meningkatkan fungsi kelembagaan adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang kait mait dengan adat dan kerukunan hidup masyarakat Riau, antara lain dengan melakukan pendekatan dan pertemuan dengan semua unsur dan komponen masyarakat Riau, termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan dll.

Mudah-mudahan saran ini dapat membantu upaya untuk mengekalkan adat istiadat di daerah ini, serta mengangkat tuah dan marwah, harkat dan martabatnya serta menampakkan kemandirian dan “*jatidiri*”nya dalam arti luas.

VII. P E N U T U P

Barangkali, pengalaman selama ini semakin menyadarkan semua pihak bahwa tanpa dilandasi oleh adat dan nilai-nilai luhurnya yang Islami, kehidupan masyarakat kita sudah ditulari beragam kemaksiatan dan perilaku yang cenderung

“*menyalah*”, atau tidak serasi dengan tatanan nilai budaya Melayu itu sendiri. Selain itu, kelalaian membina dan mengembangkan adat, kelambanan dan kegamangan mengekalkan kelembagaan adat tempatan, akan menjatuhkan tuah, marwah, harkat dan martabat masyarakat Melayu, sehingga mudah “*dilecehkan*” orang lain. Karenanya, apapun upaya kearah penggalian, pembinaan dan pengembangan budaya umumnya, adat istiadat dan kelembagaan adat khasnya perlulah didukung oleh semua pihak. Mudah-mudahan dengan meningkatkan peranan kelembagaan adat, serta tergalinya khasanah adat (budaya) Melayu, akan dapat membentuk manusia yang beradab, serta mewujudkan masyarakat yang bertamadun Islami, tangguh, kokoh dalam persebatian antar puak dan suku, kaum dan bangsa. Masyarakat inilah yang diharapkan mampu bersaing serta mampu menghadapi segala cabaran dari pihak manapun juga. Dan di atas segala-galanya, masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang mandiri, percaya diri, bersatu dan dihormati serta disegani oleh lawan dan kawan, sejahtera lahiriah dan batiniahnya.

Dengan demikian ungkapan adat yang mengatakan “*biar mati anak jangan mati adat*” akan benar-benar mampu membangkitkan “semangat kemelayuan” dalam jiwa keislaman yang tangguh. Dan dengan demikian pula masyarakat kita dapat duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan masyarakat lain, serta menjadi “*tuan di rumahnya sendiri*”, yakni “tuan yang arif, bijak dan bermarwah, sehingga dapat dan menjadi ikutan dan diteladani serta dihormati orang lain.

Kitapun berharap, dengan bangkitnya kelembagaan adat, dapat pula membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, membela hak-hak adat, mengekalkan kehidupan aman dan damai dalam berbilang suku dan puak, kaum dan bangsa. Bangkit dan berfungsinya adat

dan kelembagaan adat sdi seluruh Riau, diharapkan dapat menghapus segala bentuk kemaksiatan, memberantas narkoba, perjudian, dan sebagainya. Selanjutnya melalui nilai-nilai hakiki adat dan budaya Melayu dan berfungsinya kelembagaan adat Melayu, dapat membantu pembangunan di Riau dalam arti seluas-luasnya, karena pembangunan memerlukan landasan dan acuan nilai dan memerlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Kita berazam, pembangunan di Riau, apapun wujudnya, hendaklah menempatkan kebudayaan Melayu sebagai “roh”, (jiwa), sebagai “mahkota” dan teraju bagaikan “*pucuk jala pum punan ikan*”. Tekad ini diharapkan terwujud melalui penyusunan “Master Plan Riau 2020” yang sekarang sedang dalam proses penyusunannya. Lembaga Adat Melayu Riau secara tegas menolak rancangan pembangunan yang mengabaikan adat dan budaya Melayu.

Kita mengharapkan, di dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dengan keberagaman suku dan puak, dengan keberagaman latar belakang budaya dan agama, akan tetap terpelihara kerukunan hidup, sehingga daerah ini tetap tertib, aman dan damai. Berbagai permasalahan sebaiknya dipecahkan dan dirundingkan secara bersama-sama melalui asas “*musyawarah dan mufakat*” sebagai salah satu asas utama penyelesaian permasalahan dalam adat dan budaya Melayu. Kita pun berharap agar masyarakat adat, kelembagaan adat dan pemerintah dapat mengekalkan kerjasamanya secara lebih terarah dan terpadu. Dengan demikian, upaya mengekalkan persebatian (persatuan dan kesatuan) masyarakat, upaya memberantas penyakit masyarakat (kemaksiatan, perjudian, minuman keras, tindakan kejahatan dll), upaya untuk meningkatkan kerukunan hidup, aman, damai dan sejahtera, dapat berjalan dengan baik dan didukung semua pihak. Sebab tanpa kebersamaan, sulitlah untuk mencapai harapan kita semua untuk

mewujudkan masyarakat yang tertib, aman dan damai itu, sejahtera lahiriah dan batiniahnya.

Kepada Allah kita bersyukur, bahwa kita dilahirkan dalam puak Melayu yang Islami, yang memiliki nilai-nilai asas Islam yang abadi sebagai “jatidiri” dan pegangan serta landasan dalam kehidupan di dunia ini. Nilai-nilai inilah yang Insya Allah akan membawa kita semua kepada kehidupan yang sejahtera di dunia dan sejahtera pula di akhirat kelak.

Terima kasih.

Pekanbaru, 2002